



Penyimpangan se-Kalbar Rp 292 M

■ Fitra Kritisi Penegak Hukum

PONTIANAK, TRIBUN - Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan, dari hasil audit BPK semester 1 Tahun 2013, wilayah Kalimantan Barat ditemukan penyimpangan anggaran sebesar Rp 292.134.870.000 dengan 1.904 kasus penyimpangan anggaran.

"Temuan penyimpangan anggaran pada level provinsi sebesar Rp 121.877.510.000 dengan 288 kasus penyimpangan anggaran. Sedangkan pada level 14 kabupaten atau kota, ditemukan penyimpangan anggaran sebesar Rp 170.257.360.000 dengan 1.616 kasus penyimpangan anggaran," ungkap Uchok di sela-sela pelatihan media terkait advokasi kebijakan publik anggaran di Hotel Kini, Sabtu (22/3).

Menurutnya, banyak kasus

Temuan penyimpangan anggaran pada level provinsi sebesar Rp 121.877.510.000 dengan 288 kasus penyimpangan anggaran. ❗

UCHOK SKY KHADAFI

Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra

penyimpangan tidak ditindaklanjuti oleh aparat hukum. Malah tidak ada niat baik dari pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil auditor negara untuk setiap tahun.

"Sehingga, kasus-kasus dari tahun 2009-2013 semakin menumpuk dan menjadikan hasil audit BPK hanya dianggap sam-pah oleh Pemda," ungkapnya.

nan RKPD, Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Rancangan Perda APBD dan penetapan APBD.

"APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan selama satu tahun anggaran.

Alokasi dana yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan serta hasil yang dicapai," katanya. (vio)